



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompok, Telp: (0771) 4575299, Fax: (0771) 4575298
TANJUNGPINANG

email: dp3ap2kbkepri@gmail.com, web: <http://bpppa.kepriprov.go.id>

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----------|---|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| A | Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | | | | | | | | | |
| 1 | Kedudukan domisili dan alamat lengkap | Kedudukan domisili dan alamat lengkap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau (Terdiri dari, Alamat, Nomor Fax/Telp, <i>email</i>) | Sekretaris | Sekretaris | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> , dan <i>website</i> | V | - | - | 60 Bulan |
| 2 | Misi | Berisi tentang Misi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau adalah misi yang ke 4 dari misi Gubernur. | Sekretaris | Sekretaris | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> , dan <i>website</i> | V | - | - | 60 Bulan |
| 3 | Tupoksi | Tugas Pokok Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau merujuk pada Pergub Nomor 60 tahun 2016. | Sekretaris | Sekretaris | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> , dan <i>website</i> | V | - | - | 60 Bulan |
| 4 | Struktur Organisasi | Struktur Organisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau merujuk pada Pergub Nomor 60 tahun 2016. | Sekretaris | Sekretaris | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> , dan <i>website</i> | V | - | - | 60 Bulan |
| 5 | Gambaran Umum Satuan Kerja | Gambaran umum tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan jumlah pegawai, menurut Eselon dan Tingkat Pendidikan. | Sekretaris | Sekretaris | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> , dan <i>website</i> | V | - | - | 60 Bulan |
| 6 | Profil Singkat Pejabat Struktural | Berisi tentang gambaran umum secara singkat pejabat struktural di Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau, yang berisi tentang nama, | Sekretaris | Sekretaris | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> , dan <i>website</i> | V | - | V | 60 Bulan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----------|--|---|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | | Nomer Telp. / HP, Rumah, Pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima. | | | | | | | | |
| B | Informasi Tentang Program dan Kegiatan yang Sedang Dijalankan | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | |
| | a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Berisi tentang data : Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (penyusunan laporan LAKIP 2024). | Perencana Ahli Muda | Perencana Ahli Muda | Dinas P3AP2KB | Softcopy, | V | - | V | 60 Bulan |
| | b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Berisi tentang data Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (produknya adalah Laporan Akhir Keuangan OPD); penyediaan gaji dan tunjangan ASN; penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Perencana Ahli Muda | Perencana Ahli Muda | Dinas P3AP2KB | Softcopy, | V | - | V | 60 Bulan |
| | c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Berisi tentang Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah OPD (data berisi Honor atau gaji THL pengamanan dan keamanan barang inventaris kantor. | Perencana Ahli Muda | Perencana Ahli Muda | Dinas P3AP2KB | Softcopy, | - | - | - | 60 Bulan |
| | d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Berisi tentang data : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Kasubag Umpeg | Kasubag Umpeg | Dinas P3AP2KB | Softcopy, | V | - | V | 60 Bulan |
| | e. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Berisi tentang data : penyediaan omponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Logistik kantor Penyediaan Barang etaan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi OPD | Kasubag Umpeg | Kasubag Umpeg | Dinas P3AP2KB | Softcopy, | V | - | V | 60 Bulan |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|---|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berisi tentang data : Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kasubag Umpeg | Kasubag Umpeg | Dinas P3AP2KB | Softcopy, | V | - | V | 60 Bulan |
| | g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berisi tentang data : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Kasubag Umpeg | Kasubag Umpeg | Dinas P3AP2KB | Softcopy, | V | - | V | 60 Bulan |
| | h. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD) | Berisi tentang sub kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan rumah tangga 2. Penyediaan Bahan logistik kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD | Ka. UPTD PPA | Ka. UPTD PPA | Dinas P3AP2KB | Softcopy, | V | - | V | 60 Bulan |
| | i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) | Berisi tentang sub kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Ka. UPTD PPA | Ka. UPTD PPA | Dinas P3AP2KB | Softcopy, | V | - | V | 60 Bulan |
| | j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) | Berisi tentang sub kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Ka. UPTD PPA | Ka. UPTD PPA | Dinas P3AP2KB | Softcopy, | V | - | V | 60 Bulan |
| 2 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | | | | |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|---|--|--|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Berisi tentang jumlah focalpoin OPD yang mendapatkan pelatihan PPRG dan Besaran Anggaran yang responsif gender pada masing-masing OPD | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy dan website</i> | V | - | V | 60 Bulan |
| | b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | Berisi tentang Sub. kegiatan: 1. Capacity Buliding Bagi Perempuan Politik 2. Pelatihan Publik Speaking bagi Perempuan Politik 3. Pelatihan Keterampilan Perempuan (life skill) 4. Pelatihan Kepemimpinan Perempuan | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> | V | - | V | 60 Bulan |
| | c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Berisi tentang Sub. kegiatan: 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yakni Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Perempuan Provinsi Kepri mencakup: 1) Pelaksanaan Paket C 2) Pelaksanaan Kursus Tataboga 3) Pelaksanaan Kursus Tatabusana 4) Pemberian Bantuan Peralatan Pendukung 5) Inspiring Class 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi mencakup: 1) Pelatihan Keterampilan Tata Boga di Kota Batam | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> | V | - | V | 60 Bulan |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|---|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | | | | |
| | a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <p>Berisi tentang : Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi</p> <p>Pelaksanaan kegiatan :</p> <p>Sosialisasi Pencegahan KDRT dan TPPO bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Aparatur Desa dan masyarakat.</p> | PSM Ahli Muda | PSM Ahli Muda | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy dan website</i> | V | - | V | 60 Bulan |
| | b. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD) | <p>Berisi tentang pertemuan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terdiri dari 10 pertemuan :</p> <p>Diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP Integrasi Pelayanan PPA (1 pertemuan) 2. Pencegahan KTP, KTA dan TPPO yang melibatkan organisasi keagamaan, kemasyarakatan, Lembaga adat, Lembaga profesi, dunia usaha, media dan Lembaga masyarakat lainnya (5 pertemuan) 3. Advokasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan Perempuan dan anak (1 pertemuan) 4. Peningkatan kapasitas forum anak, PATBM, PUSPAGA, Satgas PPA, Forum Puspa, Komunitas PPTPPO dll (1 Peretemuan) 5. Rapat koordinasi pencegahan kekerasan (1 pertemuan) 6. Kampanye perlindungan perempuan dan anak (1 pertemuan) | Ka. UPTD PPA | Ka. UPTD PPA | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy dan website</i> | V | - | V | 60 Bulan |
| | c. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan | <p>Berisi tentang data : Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota</p> | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy dan website</i> | V | - | V | 60 Bulan |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <p>Pelaksanaan kegiatan :</p> <p>Cetak bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> | | | | | | | | |
| | d. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD) | <p>Berisi tentang pemberian layanan kepada korban yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makan Minum Korban 2. Medikolegal (visum, saksi ahli, pemulihan korban, pemeriksaan penunjang) 3. Pendampingan korban oleh petugas PPA | Ka. UPTD PPA | Ka. UPTD PPA | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy dan website</i> | V | - | V | 60 Bulan |
| | e. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <p>Berisi tentang sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan | Ka. UPTD PPA | Ka. UPTD PPA | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> | V | | V | 5 Tahun |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | | | | | 60 Bulan |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|--|---|--|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Berisi tentang Sub. kegiatan: 1) Pelatihan Tata Rias 2) Pelatihan Lifeskill Menjahit 3) Pelatihan Keterampilan Tata Boga | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| | b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provins | Berisi tentang Pengembangan dan Pembinaan Workshop Rumah Terampil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 5 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | | | | |
| | a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Berisi kegiatan pelembagaan PHA pada Lembaga melalui pelatihan PHA pada tenaga pendidik, tenaga Kesehatan, PISA, dll. Berisi kegiatan upaya untuk mencegah perkawinan usia Anak, koordinasi dengan Dukcapil terkait pemenuhan hak sipil anak melalui pencapaian kepemilikan Akte kelahiran dan KIA, Pojok ASI dan Kawasan tanpa Asap Rokok. Berisi tentang data tentang : Data Kepemilikan Akte Kelahiran Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy dan website | V | - | V | 60 Bulan |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|---|--|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | | Data Perempuan Usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun Data Perkawinan Usia Anak dari Kemenag | | | | | | | | |
| | b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Berisi tentang penguatan kelembagaan Pemenuhan Hak Anak seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Forum Anak, Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA), Pengembangan Pusat layanan Kesehatan Ramah Anak (SRA), monitoring Pusat Kreativitas Anak (PKA), pendampingan APSAI, koordinasi dengan Dinas Sosial terkait LKSA, dll. Berisi tentang : data Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Data Jumlah penerima layanan Puspaga Data Sekolah Ramah Anak (SRA) Data Puskesmas Ramah Anak (PRA) Data Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Data Forum Anak Data LKSA se Prov Kepri Data Pusat Kreativitas Anak (PKA) | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy dan website | V | - | V | 60 Bulan |
| 6 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | | | | |
| | a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Berisi tentang a. Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat. | Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy dan website | V | - | V | 60 Bulan |
| | b. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan | Berisi tentang : 1. Medikolegal 2. Makan Minum Korban 3. Pendampingan oleh Petugas PPA | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy dan website | V | - | V | 60 Bulan |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|--|---|--|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD) | | | | | | | | | |
| | c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota (UPTD) | Berisi tentang sub kegiatan : a. Pelatihan Manajemen Kasus b. Pelatihan penerapan kode etik perlindungan c. Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Simfoni V 2 | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy dan website | V | - | V | 60 Bulan |
| 7 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | | | | | 60 Bulan |
| | a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Berisi tentang data : Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)Tingkat Provinsi | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB | Dinas P3AP2KB | Softcopy dan website | V | - | V | 60 Bulan |
| 8 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN | | | | | | | | | |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----------|---|--|--|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | | | | | |
| | a. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Berisi tentang data : Pelaksanaan Fasilitas,Pembimbingan,Pengembangan, danPenguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy dan website</i> | V | - | V | 60 Bulan |
| | b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Berisi tentang a. Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga b. Fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy dan website</i> | V | - | V | 60 Bulan |
| C | Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Badan Publik | | | | | | | | | 60 Bulan |
| 1 | RENJA SKPD Dinas P3AP2KB | Berisi tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 | Sekretaris | Sekretaris | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> | V | - | - | 60 Bulan |
| 2 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 | Berisi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 | Sekretaris | Sekretaris | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> | V | - | - | 60 Bulan |
| 3 | Target dan/atau capaian program dan kegiatan. | Berisi tentang target dan/atau capaian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau. | Sekretaris | Sekretaris | Dinas P3AP2KB | <i>Softcopy</i> | V | - | - | 60 Bulan |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|--|---|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 4 | Penanggung Jawab Pelaksana program dan kegiatan | Berisi tentang daftar penanggung jawab pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau.(SK PA, KPA dan PPTK) | Sekretaris | Sekretaris | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| D | Ringkasan Laporan Keuangan | | | | | | | | | |
| 1 | Rencana dan laporan realisasi anggaran | Berisi tentang rencana dan laporan realisasi anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau. | Sekretaris dan Kepala Bidang DP3AP2KB | Sekretaris dan Kepala Bidang DP3AP2KB | Dinas P3AP2KB | Hardcopy | - | - | - | Sesuai ketentuan yang mengatur |
| 2 | Neraca | Berisi tentang neraca atau laporan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau | Analisis Keuangan Pusat dan daerah | Analisis Keuangan Pusat dan daerah | Dinas P3AP2KB | Hardcopy | - | - | - | Sesuai ketentuan yang mengatur |
| 3 | Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku | Berisi tentang laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau. | Bendahara | Bendahara | Dinas P3AP2KB | Hardcopy | - | - | - | Sesuai ketentuan yang mengatur |
| 4 | Daftar aset dan investasi | Berisi tentang data daftar aset dan investasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau. | Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah | Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah | Dinas P3AP2KB | Hardcopy | V | - | - | Sesuai ketentuan yang mengatur |
| E | Informasi tentang Peraturan Perundang undangan yang sudah diterbitkan | | | | | | | | | |
| 1 | Perauran Daerah No. 12 Tahun 2007 | Berisi tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 2 | Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 | Berisi Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau | Kabid Kualitas Hidup Perempuan | Kabid Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 3 | Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 | Berisi Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak | Kabid Perlindungan | Kabid Perlindungan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | | | Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | | | | | | |
| 4 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 16 Tahun 2008 | Berisi Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di Kepulauan Riau | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 5 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.8 Tahun 2014 | Berisi Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 6 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.12 Tahun 2016 | Berisi Tentang Penyelenggaraan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 7 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.55 Tahun 2018 | Berisi Tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 8 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 19 Tahun 2010 | Berisi Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau | Kabid Kualitas Hidup Perempuan | Kabid Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 9 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 20 Tahun 2019 | Berisi Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Riau | Kabid Kualitas Hidup Perempuan | Kabid Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 10 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 23 Tahun 2011 | Berisi Tentang Petunjuk Pelaksanaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau | Kabid Pemenuhan Hak Anak | Kabid Pemenuhan Hak Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 11 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 30 Tahun 2011 | Berisi Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau | Kabid Pemenuhan Hak Anak | Kabid Pemenuhan Hak Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|--|---|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 13 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 228 Tahun 2016 | Berisi Tentang Anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016-2021 | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 14 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 81 Tahun 2017 | Berisi tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada DP3AP2KB | Ka. UPTD PPA | Ka. UPTD PPA | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 15 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 57 Tahun 2017 | Berisi tentang Penanganan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Aplikasi Cek Dare di Provinsi Kepulauan Riau. | Ka. UPTD PPA | Ka. UPTD PPA | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 16 | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 55 Tahun 2022 | Berisikan Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Perempuan Terpadu Tindak Pidana | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| 17 | Surat Edaran Gubernur No 120/1255/SET | Berisi tentang Usulan Program tahun 2024 yang Responsif Gender | Kabid Kualitas Hidup Perempuan | Kabid Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | V | 60 Bulan |
| | Informasi tentang Lembaga Layanan Perempuan dan Anak | | | | | | | | | 60 Bulan |
| 1 | UPTD PPA | Jl. Riau No 1-2 Tanjungpinang, Email : uptdppaprovkepri@yahoo.com Tlp. 0811 771 881 | Ka. UPTD PPA | Ka. UPTD PPA | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 2 | Workshop Rumah Terampil | Jl Riau No. 5 Tanjungpinang | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 3 | PUSPAGA | Jl Riau No. 5 Tanjungpinang | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| H | Informasi Perjanjian (MoU) Tentang Kerjasama | | | | | | | | | 60 Bulan |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|--|---|--|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | PKS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kota Batam Kota Tanjungpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kep.Anambas Tahun 2018 | Berisi tentang Program dan Kegiatan Perwujudan Kesetaraan Gender Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau | Sekretariat | Sekretariat | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 2 | PKS DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri Tahun 2018. | Berisi tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 3 | PKS DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2017 | Berisi tentang Peningkatan Patisipasi Politik Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 4 | PKS DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 | Berisi tentang Perlindungan dan Penanganan Keluarga Aparatur Sipil Negara Korban Tindak Kekerasan | Sekretariat | Sekretariat | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 5 | PKS DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 | Berisi tentang Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang. | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 6 | PKS DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan DP3AP2KB Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 | Berisi tentang Kerjasama Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang. | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 7 | PKS DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdulrahman Kepulauan Riau Tahun 2019 | Berisi tentang penelitian, pengembangan kompetensi, peningkatan SDM dan Pembangunan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Sekretariat | Sekretariat | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 9 | PKS Antara OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Se | Berisi tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |

| No | Jeni Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | Jangka Waktu Penyimpanan |
|----|---|--|--|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan serta merta | Wajib disetiap saat | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | Wilayah Sumatera Tahun 2018 | | | | | | | | | |
| 10 | PKS DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 | Berisi tentang Pelayanan Rehabilitasi Medis Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| I. | Informasi Tentang Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Profesi dan Lembaga Masyarakat | | | | | | | | | 60 Bulan |
| 1 | PKS DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan Adkat/Pengacara Sayid Azhari dan Rekan Tahun 2018 | Berisi tentang Pendampingan Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 2 | PKS DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2017 | Berisi tentang penelitian, peningkatan kualitas SDM dan Pembangunan di Bidang PPPA | Sekretariat | Sekretariat | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 3 | PKS DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan Alisa Khadijah ICMI Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 | Berisi tentang Pelaksanaan Peningkatan Keterampilan Perempuan | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |
| 4 | PKS DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan Batik Rangga Yul Zhayen Tahun 2018 | Berisi tentang Pelaksanaan Peningkatan Keterampilan Perempuan | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Dinas P3AP2KB | Softcopy | V | - | - | 60 Bulan |

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

____KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Burhanuddin, S.Hut., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c
NIP. 197103201998031008